Co-funded by the European Union

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Green Transition Journalism Fellowship
"Pembangunan Transisi Hijau, Siapa yang Menikmati Hasil? Siapa yang Menanggung Dampak Pembangunannya?"

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari krisis iklim, degradasi lingkungan, meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana, hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang memperbesar kerentanan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen global terhadap aksi iklim, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* dan menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai bentuk komitmen nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada *First NDC*, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% melalui upaya sendiri (*unconditional*) dan hingga 41% dengan dukungan internasional (*conditional*) pada tahun 2030.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui *Second NDC* yang disampaikan pada tahun 2025. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menggunakan target persentase, *Second NDC* menetapkan target absolut emisi gas rumah kaca hingga tahun 2035 dengan tahun dasar 2019. Dokumen ini juga memperluas cakupan sektor mitigasi, tidak hanya meliputi kehutanan dan penggunaan lahan (*Forestry and Other Land Use/FOLU*), pertanian, energi, *Industrial Processes and Product Use* (IPPU), serta limbah, tetapi juga memasukkan subsektor baru, termasuk ekosistem pesisir dan karbon biru (*blue carbon*).[1]

Perluasan cakupan tersebut menunjukkan semakin besarnya ambisi Indonesia dalam mendorong transisi menuju pembangunan rendah karbon. Namun, di sisi lain, implementasi agenda transisi hijau juga membutuhkan investasi dan pendanaan dalam skala besar, baik dari pemerintah nasional maupun pendanaan internasional. Tanpa tata kelola yang inklusif, proses ini berpotensi memperbesar berbagai konflik sosial-ekologis, seperti konflik agraria, pencemaran lingkungan, kriminalisasi warga, hingga penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan. Oleh karena itu, transisi hijau tidak dapat dipahami semata sebagai transformasi menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga sebagai proses yang menjamin keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap masyarakat adat, perempuan, serta kelompok rentan lainnya.

Di saat yang sama, implementasi agenda transisi hijau berlangsung dalam situasi ruang sipil yang semakin menyempit. Meskipun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 mencapai 79,51 dan melampaui target RPJMN 2019–2024 sebesar 78,37,[2] kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi substantif. Menurut data CIVICUS 2025, ruang sipil di Indonesia dikategorikan "Terhalang" atau *"Obstructed"*, yang artinya semakin terbatasnya kebebasan berekspresi berserikat, dan berkumpul bagi masyarakat sipil. Dalam 6 bulan pertama di tahun 2025, CIVICUS mencatat

[1] WRI Indonesia. *Second NDC Indonesia Sudah Terbit, Apakah Target Iklim Lebih Ambisius?*. https://wri-indonesia.org/id/wawasan/second-ndc-indonesia-sudah-terbit-apakah-target-iklim-lebih-ambisius

[2] Badan Pusat Statistik (BPS). *Indeks Demokrasi Indonesia 2023*. Indonesiabaik.id.

terdapat 100 aktivis HAM yang mengalami penangkapan, intimidasi, hingga serangan fisik. Korban ini adalah aktivis lingkungan dan agraria, organisator mahasiswa, akademisi, pegiat buruh, dan aktivis yang mengkampanyekan antikorupsi.[3] Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural: indikator formal meningkat, tetapi perlindungan substantif terhadap ruang sipil tetap lemah dan rentan terhadap pembatasan.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dan jurnalis dalam melakukan monitoring terhadap dampak pembangunan transisi hijau. Selain menghadapi risiko keamanan yang semakin tinggi, hasil monitoring OMS juga umumnya hanya beredar di kalangan advokasi dan pembuat kebijakan tertentu, sehingga belum mampu menjangkau ruang publik yang lebih luas. Padahal, semakin besarnya tata jalan menuju Indonesia yang bebas dari emisi, hal ini membutuhkan pengawasan publik yang independen, berbasis bukti, dan mampu mendorong akuntabilitas pemerintah, pelaku usaha, maupun lembaga pendanaan.

Atas dasar tersebut, program ***Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs to Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)*** yang dipimpin oleh Yayasan Penabulu dan didukung oleh Uni Eropa mengembangkan ***Green Transition Journalism Fellowship*** sebagai ruang kolaborasi antara jurnalis dan organisasi masyarakat sipil. Melalui skema ini, jurnalis dapat bekerjasama dengan jaringan OMS-OMS untuk berkolaborasi menyediakan data awal, akses komunitas, dan konteks lapangan, sementara jurnalis melakukan peliputan dengan menerapkan standar jurnalistik melalui proses verifikasi, konfirmasi, dan penyuntingan yang independen. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan karya jurnalistik yang tidak hanya mengungkap dampak negatif pembangunan transisi hijau terhadap kelompok marginal, tetapi juga mendokumentasikan praktik-praktik baik masyarakat dalam mewujudkan transisi hijau yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil monitoring tidak berhenti sebagai dokumen advokasi, melainkan berkembang menjadi pengetahuan publik yang mampu memperkuat pengawasan masyarakat serta mendorong respons dan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan.

B. Tujuan

Green Transition Journalism Fellowship bertujuan untuk:

1. Memperkuat kolaborasi antara jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dalam mendokumentasikan dampak sosial-ekologis pembangunan transisi hijau di Indonesia dalam 5 isu prioritas, yaitu: Limbah & Energi, Pangan & Pertanian, Pesisir & Kelautan, FOLU, dan Humanitarian.
2. Memfasilitasi akses jurnalis terhadap data, jaringan, dan konteks lapangan yang dimiliki OMS sebagai dasar penyusunan liputan yang mendalam dan berbasis bukti.
3. Menghasilkan 10 karya yang dapat dieksplor dari beberapa isu yang mengangkat dampak pembangunan transisi hijau terhadap kelompok rentan sekaligus praktik-praktik baik masyarakat dalam mewujudkan transisi hijau yang adil.
4. Mempublikasikan seluruh karya melalui kanal media sosial milik media, OMS kolaborator, dan *platform* media CO-EVOLVE 2 untuk memperluas jangkauan advokasi kepada publik dan pengambil kebijakan.

[3] CIVICUS. Indonesia Masuk Daftar Pemantauan Lantaran Pemerintahan Prabowo Menahan Kebebasan Sipil. https://monitor.civicus.org/watchlist-july-2025/indonesia/

C. Output

Kegiatan *Green Transition Journalism Fellowship* diharapkan menghasilkan:

1. Terjalinnya kolaborasi antara media dan jaringan OMS dalam pelaksanaan monitoring dampak pembangunan transisi hijau di Indonesia.
2. Terselenggaranya workshop daring untuk pemberian materi pembekalan dan menyusun kerangka monitoring dan pedoman peliputan (*monitoring framework*) yang digunakan bersama oleh Jurnalis dan OMS lokal.
3. Terpublikasinya 10 karya jurnalistik di berbagai *platform* media milik jejaring jurnalis, OMS, maupun milik CO-EVOLVE 2 mengenai dampak pembangunan transisi hijau di Indonesia serta praktik-praktik baik masyarakat dalam mendorong solusi lokal.
4. Adanya seminar nasional (*hybrid)* sebagai ruang publikasi hasil liputan kepada pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Tahapan Pelaksanaan

1. **Persiapan & Kontraktual**
   Penyusunan dan penandatanganan kerja sama antara Penabulu dengan, termasuk kesepakatan lingkup kerja, target output (10 karya), proporsi tema (dampak vs praktik baik), dan mekanisme pelaporan.

2. **Monitoring Action Design Workshop**
   Workshop 1-2 hari secara daring yang mempertemukan Green Transition Manager CO-EVOLVE 2, dengan Jurnalis dan OMS untuk (a) pembekalan materi sebelum turun ke lokasi (b) menyusun kerangka monitoring yang dapat digunakan oleh Jurnalis dan OMS, dan (c) menerjemahkannya menjadi pedoman/framework liputan serta pelatihan dasar monitoring bagi jurnalis fellow. Peserta mencakup perwakilan nasional dan daerah dengan tingkat konflik lahan tinggi.

3. **Seleksi & Penugasan Fellow**
   Mitra mengundang (*by invitation*) jurnalis dari jaringannya. Penugasan kasus/wilayah liputan dilakukan berdasarkan rujukan data awal dari lokasi yang teridentifikasi terjadi konflik akibat proyek-proyek atas nama pembangunan hijau dengan mempertimbangkan sebaran wilayah dan keseimbangan tema (dampak negatif vs praktik baik atau inisiatif masyarakat dari pengetahuan lokal).

4. **Peliputan Lapangan & Pendampingan**
   Jurnalis fellow melakukan liputan lapangan dengan jaringan OMS-OMS lokal yang memfasilitasi akses data, narasumber, dan konteks komunitas di masing-masing wilayah.

5. **Editing, Verifikasi, & Quality Check**
   Media mitra melakukan proses editorial standar (fact-checking, verifikasi narasumber, kode etik jurnalistik), termasuk memastikan keseimbangan proporsi tema sesuai kesepakatan awal.

6. **Publikasi**
   10 karya jurnalistik dipublikasikan melalui kanal media mitra, kanal media sosial OMS kolaborator, dan platform CO-EVOLVE 2.

7. **Seminar Nasional (Hybrid)**
   Diseminasi hasil liputan dalam seminar nasional format hybrid, dengan 50 peserta yang terdiri dari OMS, Jurnalis, dan pemangku kepentingan lainnya dan menampilkan 10 studi kasus sebagai bahan diskusi kebijakan.

E. Kualifikasi Mitra

1. Memiliki rekam jejak dalam memproduksi liputan mengenai isu lingkungan hidup, transisi energi, transisi hijau, agraria, hak asasi manusia, atau isu sosial-ekologis lainnya.
2. Memiliki mekanisme editorial yang menjunjung tinggi prinsip independensi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik.
3. Memiliki jaringan jurnalis/kontributor di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya daerah yang menjadi lokasi advokasi atau terdampak pembangunan transisi hijau.
4. Memiliki jaringan atau relasi dengan OMS yang tengah mengawal advokasi pada isu terkait.
5. Memiliki dan mengelola kanal media sosial secara aktif sebagai sarana diseminasi hasil liputan.
6. Tidak memiliki afiliasi bisnis/politik langsung dengan sektor yang berpotensi menjadi objek liputan (mis. korporasi ekstraktif, energi, atau proyek transisi hijau tertentu) untuk menghindari konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

F. Waktu Pelaksanaan

Desember 2026 - April 2027

G. Prosedur Pendaftaran

Proposal dan dokumen pendukung dapat dikirim melalui email: pengadaan@penabulu.id maksimal tanggal **23 November 2026 pukul 17.00 WIB.** Subjek email: **FellowshipJurnalis_COEVOLVE2_(Nama Lembaga Pelamar)**, dengan melampirkan beberapa dokumen:

1. Curriculum vitae
2. Portofolio yang relevan dari pengalaman sebelumnya
3. Proposal teknikal (Metodologi, pendekatan, linimasa kerja, dan *tools* yang akan digunakan)
4. Proposal finansial yang mencakup rincian harga satuan (apabila ada) serta total nilai penawaran.